

## **BAB II**

### **PENANAMAN NILAI MORAL SISWA OLEH GURU PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

#### **A. Penanaman Nilai Moral Siswa**

##### **1. Pengertian Nilai Moral**

Nilai moral pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu nilai dan moral. Keduanya memiliki arti yang berbeda dan kalau digabungkan memiliki arti tersendiri. Adapun pengertian nilai secara etimologi yaitu nilai berasal dari bahasa Latin Valere yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Menurut Sutarjo Adisusilo (2012: 56) mengemukakan bahwa “Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Menurut Steeman (Eka Darmaputera, 1987: 65) mengemukakan bahwa: “Nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang”.

Moral pada dasarnya adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Moral juga memiliki kesetaraan atau kesamaan arti dengan pengertian akhlak, budi pekerti dan susila. Moral juga berkaitan dengan kondisi mental yang

membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin dan sebagainya. Menurut Sastrapratedya (2001: 54) “Moral adalah segala hal yang terkait dengan perilaku manusia dan norma-norma yang dipengang masyarakat yang mendasarinya”. Moral menurut W.J.S. Poerdarminta (dalam Hamid Darmadi, 2009: 50) adalah “Merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan.” Pendapat lain dikemukakan oleh Dewey (dalam C. Asri Budiningsih, 2008: 24) mengatakan bahwa “Moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila.” Selanjutnya, Hamid Darmadi (2009: 50) mengatakan bahwa “Dalam masyarakat Indonesia moral yang dimaksud adalah moral Pancasila, termasuk didalamnya nilai-nilai UUD 1945.”

Nilai moral menurut Esteban (Sutarjo Adisusilo, 2011: 56-57) *“Moral values are universal truths which man holds to be good and impoertant; they are the ethical principles which he struggles to attain and implement in his daily life. They are the ideals which transcend all time and space;those which the valid for all men regardless of race or religion; the ones which unite strangers, families, nations-all of humanity-with God”*. Artinya Nilai-nilai moral yang universal yang mana manusia kebenaran memegang untuk menjadi baik dan penting; mereka adalah prinsip-prinsip etika yang ia berjuang untuk mencapai dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah cita-cita yang melampaui semua waktu dan ruang, mereka yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras atau agama; yang yang menyatukan orang-orang asing,

keluarga, negara-semua umat manusia dengan Tuhan. Menurut Abdulkadir Muhammad (2008: 69) mengemukakan bahwa: “Nilai moral adalah nilai atau hasil perbuatan yang baik”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan, perbuatan, budi pekerti serta dapat pula dipahami sebagai hasil perbuatan. Nilai moral dalam proses pembelajaran sangat diperlukan karena nilai selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan, dan keluhuran budi pekerti yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dilingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.

## 2. Indikator Nilai sebagai sesuatu yang Abstrak

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths, et al (Sutarjo Adisusilo, 2012: 58-59) mengemukakan ada delapan indikator nilai, yaitu:

- a. Nilai memberi tujuan atau arah (*goals or purpose*) ke mana kehidupan harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan.
- b. Nilai memberi aspirasi (*aspirations*) atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan.
- c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (*attitudes*), atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku.
- d. Nilai itu menarik (*interests*), memikat hati seseorang untuk dipikirkan, untuk direnungkan, untuk dimiliki, untuk diperjuangkan dan untuk dihayati.
- e. Nilai mengusik perasaan (*feelings*), hati nurani seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat, dan lain-lain.
- f. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (*beliefs and convictions*) seseorang, suatu kepercayaan atau keyakinan terkait dengan nilai-nilai tertentu.

- g. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (*activities*) perbuatan atau tingkat laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai tersebut.
- h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, mengalami dilemma atau menghadapi berbagai persoalan hidup (*worries, problems, obstacles*).

Dari pendapat tersebut maka dapat kita ketahui dan dicermati tentang indikator nilai sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi peranannya begitu penting dan banyak di dalam hidup manusia. Kedelapan indikator nilai tersebut seperti nilai memberi tujuan atau arah, nilai memberi aspirasi dan inspirasi kepada seseorang, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku, nilai menarik dan memikat hati, nilai mengusik perasaan, nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan, nilai menuntut adanya aktivitas, serta nilai muncul dari kesadaran, hati sanubari dan pikiran seseorang.

### 3. Macam-Macam Nilai

Suatu nilai tingkat atau derajat keluhurannya pasti tidak sama, Max Sceler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dibedakan menjadi empat tingkatan, yaitu :

- a. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die Wertreihe des Angenehmen und Unangenehmen*), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.

- b. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan (*Werte des vitalen Fuhlens*), misalnya kesehatan, kesegaran jasmani kesejahteraan umum dan sebagainya.
- c. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- d. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang suci dan tak suci (*wermodalitas de Heiligen ung Unheiligen*), nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Nilai pada dasarnya menurut Notonegoro (2005: 120), ada tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini meliputi:
  - 1) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
  - 2) Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) manusia.
  - 3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa, *Will*) manusia.
  - 4) Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Walter G. Everett membagi nilai menjadi lima bagian sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai ekonomi (economic values) yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar.
- b. Nilai-nilai rekreasi (recreation values) yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang, sehingga memberikan sumbangan untuk menyajahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
- c. Nilai-nilai perserikatan (association values) yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga, sampai dengan tingkat internasional.
- d. Nilai-nilai kejasmanian (body values) yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang.
- e. Nilai-nilai watak (character values) nilai yang meliputi semua tantangan, kesalahan pribadi dan sosial termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri.
- f. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni), misalnya keindahan, keselarasan, keseimbangan, keserasian.
- g. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran), misalnya kecerdasan, ketekunan, kebenaran, kepastian.
- h. Nilai-nilai keagamaan (nilai-nilai yang ada dalam agama), misalnya kesucian, keagungan Tuhan, keesaan Tuhan, keibadahan.

Semua nilai-nilai itu masih bersifat abstrak, agar mudah dipahami dan dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka nilai-nilai yang masih abstrak itu dibuat menjadi norma-norma seperti norma agama, norma adat, norma kebiasaan, norma kesopanan dan sebagainya.

#### 4. Tahapan Nilai Moral dalam kehidupan manusia

Tahapan nilai moral dalam kehidupan manusia menurut Hill (Sutarjo Adisusilo, 2012: 60) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup, mempunyai tiga tahapan, yaitu:

- a. values thinking, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau values cognitive;

- b. values affective, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri orang untuk melakukan sesuatu, pada tahapan ini dapat dirinci lagi menjadi 1) disposition; 2) commitments;
- c. tahapan terakhir adalah values actions, yaitu tahap di mana nilai yang telah menjadi keyakinan dan menjadi niat (komitmen kuat) diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan konkret.

Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan Nilai moral dalam kehidupan manusia menurut Thomas Lickona (Sutarjo Adisusilo, 2012: 60) mengemukakan ada tiga tahapan, yaitu: pengetahuan nilai moral, sikap nilai moral dan tindakan nilai moral. Ketiga komponen itu menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari”.

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan nilai moral dalam kehidupan manusia dikelompokkan menjadi 3 komponen, yaitu tahap pengetahuan nilai moral, tahap sikap nilai moral dan tahap pelaksanaan atau tindakan nilai moral.

#### 5. Pendekatan nilai moral siswa

Banyak pakar telah mengembangkan berbagai pendekatan nilai moral. Dari berbagai pendekatan nilai tersebut masing-masing ada kekuatan dan kelemahannya, sangat tergantung dari tujuan pendidikan nilai dirumuskan dan kontekstual peserta didik. Oleh sebab itu, para pendidik harus dapat memilih pendekatan nilai yang tepat, yang kontekstual agar pembelajaran menjadi bermakna. Para pakar pendidikan nilai seperti Superka (Sutarjo Adisusilo, 2012: 133) mengemukakan bahwa ada lima pendekatan dalam pendidikan nilai, yaitu:

- a. pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*);

- b. pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*);
- c. pendekatan penalaran moral (*moral reasoning approach*);
- d. pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*)
- e. pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*).

Berikut ini akan dijelaskan dari kelima pendekatan tersebut, yaitu:

a. Pendekatan penanaman nilai

Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Menurut Superka et al. (1976), tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah: Pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa; Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan.

Metoda yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain.

b. Pendekatan perkembangan kognitif

Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989).



Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985).

Proses pengajaran nilai menurut pendekatan ini didasarkan pada dilemma moral, dengan menggunakan metoda diskusi kelompok. Diskusi itu dilaksanakan dengan memberi perhatian kepada tiga kondisi penting. Pertama, mendorong siswa menuju tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi. Kedua, adanya dilemma, baik dilemma hipotetikal maupun dilemma faktual berhubungan dengan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, suasana yang dapat mendukung bagi berlangsungnya diskusi dengan baik (Superka, et. al. 1976; Banks, 1985).

c. Pendekatan penalaran atau analisis nilai

Pendekatan penalaran atau analisis nilai (*values reasoning or analysis approach*) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat

nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilemma moral yang bersifat perseorangan.

Ada dua tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini. Pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial, yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Kedua, membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik, dalam menghubungkan-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Selanjutnya, metoda-metoda pengajaran yang sering digunakan adalah: pembelajaran secara individu atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional (Superka, et. al. 1976).

d. Pendekatan klarifikasi nilai

Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.

Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini ada tiga. Pertama, membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain; Kedua, membantu siswa, supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-

nilainya sendiri; Kedua, membantu siswa, supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri (Superka, et. al. 1976).

Dalam proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan metoda: dialog, menulis, diskusi dalam kelompok besar atau kecil, dan lain-lain (Raths, et. Al., 1978).

e. Pendekatan pembelajaran berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Superka, et. al. (1976) menyimpulkan ada dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri; Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Metoda-metoda pengajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai digunakan juga dalam pendekatan

ini. Metoda-metoda lain yang digunakan juga adalah proyek-proyek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, dan praktek keterampilan dalam berorganisasi atau berhubungan antara sesama (Superka, et. al., 1976).

## **B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

### **1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Banyak istilah yang beredar ditingkat global atas penyebutan untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di Amerika serikat disebut *Civics Education*, di Inggris dikenal dengan sebutan *Citizenship education*, menurut Hendry Randall Waite dalam majalah (*The Citizen and Civics* tahun 1886) merumuskan *Civics* adalah : “*The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state*”. (dapat diterjemahkan *Civics* sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi.)

Mansoor (dalam Muhammad Erwin, 2010:2) mengatakan pada hakikatnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara *civic education*, *democracy education*, serta *citizenship* yang berlandaskan pada filsafat Pancasila serta mengandung identitas nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela Negara. Selain itu Jakni (2014: 1) mengemukakan bahwa:

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat warganegara suatu negara, baik dalam konsep hubungan warga negara dengan negara, hak dan kewajiban warganegara, serta konsep sistem pemerintahan suatu negara yang dijalankan oleh warganegara. Sedangkan warganegara dapat diartikan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah negara dan negara adalah organisasi yang ada dan terpelihara dari interaksi-interaksi warganegara dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.

Berdasarkan pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia yang berbasis Pancasila tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan yang berhadapan dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, HAM, dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia dengan menggunakan filsafat Pancasila sebagai pisau analisisnya.

## 2. Visi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Visi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Somantri (2001:154) adalah bertujuan mewujudkan masyarakat demokratis merupakan reaksi atas kesalahan paradigma lama yang masih menggunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat mencolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, menghargai, dan lain-lain yang dirasionalkan demi kepentingan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan nasional.

### 3. Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Misi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49) dalam lingkup dunia pendidikan di sekolah dewasa ini dapat disimpulkan dari bagian pendahuluan pada naskah Standar Isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Misi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirangkum Winarno (2007:114-115) sebagai berikut:

Berdasarkan praktik pendidikan selama ini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia ternyata tidak hanya menggambarkan misi sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengembangkan misi, sebagai berikut:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam arti sesungguhnya yaitu *civic education*. Berdasarkan hal ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertugas membina dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik berkenaan dengan penerapan, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Misalnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimunculkan dalam pelajaran civic (Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Negara, yang merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civic (Kurikulum 1968/1969) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994).
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter. Dalam hal ini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertugas membina dan mengembangkan nilai-nilai bangsa yang dianggap baik sehingga terbentuk warga negara yang berkarakter baik bagi bangsa bersangkutan. Contoh: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimuatkan dalam pelajaran PMP (1975/1984), Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (kurikulum 1994). Di perguruan tinggi diberikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila.

- c. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan bela negara. Pendidikan kesadaran bela negara sehingga dapat diandalkan untuk menjaga kelangsungan negara dari berbagai ancaman. Contoh, diberikan mata kuliah Kewiraan di Perguruan tinggi.
- d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi (politik) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengembangkan tugas menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis untuk mendukung tegaknya demokrasi negara. Dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan ada sosialisasi, deseminasi, dan penyebarluasan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

#### 4. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Adanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia akan senantiasa diupayakan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, yakni sebagai manusia Indonesia yang religius, berkemanusiaan dan berkeadaban, yang memiliki nasionalisme, yang cerdas, yang berkerakyatan, dan yang adil terhadap lingkungan sosialnya.

Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan (pasal 2 ayat 3 UU No 20 Tahun 2003) adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

#### 5. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu pula pemerintah membuat ketentuan

mengenai kurikulum yang diatur dalam PP No. 19 tahun 2009 diantaranya adalah tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dalam pasal 6 ditegaskan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan Dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran Agama dan akhlak mulia
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Kelompok mata pelajaran estetika
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian di Sd/MI/SLB/Paket A, SMP/ MTs/SMPLB/ Paket A, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK. Atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ atau kegiatan Agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan Jasmani. Hal ini diatur dalam PP No. 19/2005 adalah berkenaan dengan kedalaman muatan Kurikulum.

Dalam pasal 8 PP No. 19/2005 ditegaskan bahwa kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/ atau semester sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kompetensi sebagaimana dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dalam hal



ini terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan menengah.

## 6. Landasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

### a. Landasan Filosofis

Pada hakikatnya manusia adalah warga Negara senantiasa diukur dari kemanfaatannya, yakni dari apa yang bisa ia miliki kepada bangsa dan negaranya. Memang, peradaban bangsa dan Negara memerlukan ilmu dan teknologi, namun itu tidak cukup. Negara juga memerlukan integritas dan nasionalisme, agar Negara tidak terjual seperti pindahnya pasir dari kepulauan riau ke singapura.

Mengalirkan integritas dan nasionalisme itu diperlukan nilai-nilai dan etika kebangsaan sebagaimana yang telah dirumuskan didalam ranah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sebagai cabang ilmu yang mengajarkan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan yang berhubungan dengan Negara, demokrasi, HAM, masyarakat madani, yang dalam impleentasinya dilakukan dengan menggunakan prinsip demokrasi dan muhanis.

### b. Landasan Sosiologis

Sebagai landasan sosiologis diperlukannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilatar belakangi oleh karena memerhatikan situasi cara hidup sehari-hari orang indonesia saat ini yang telah begitu pudar identitas aslinya, tergerus oleh paham globalisasi dengan insterumennya yang berupa kapitalisme. Bangsa indonesia yang

dulunya dikenal sebagai bangsa yang religius, toleransi, ramah, gotong royong, nasionalis, dan memiliki solidaritas social, saat ini lebih dekat kepada bentuk-bentuk kekerasan dan individualistik. Begitupun dikalangan anak mudanya yang sudah bnyak tingkah lakunya tak kenal sopan santun, yang dekat dengan hura-hura, kekerasan, pergaulan bebas, atupun penggunaan narkoba. Karena kebebasan dan keterbukaan telah membuat mereka lupa akan tanggung jawab merek sebagai anak bangsa. Kondisi seperti ini jelas akan membuat mereka jauh dengan nasionalisme, terlebih jika hendak mengangkat derajat bangsa dimata dunia.

c. Landasan Yuridis

Landasan konstitusional bagi keberadaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia senantiasa berpijak pada UUD 1945, mulai dari pembukaannya sebagaimana telah diamanatkan oleh Alinea Kedua dan Keempat yang memuat tentang aspirasi, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Lalu kalau menatap ke Batang Tubuh UUD 1945 maka disana kita akan menemui Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara” serta Pasal 30 ayat 1 yang

merumuskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatk  
pengajaran.

### C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diperlukan untuk memberikan penjelasan secara khusus mengenai penanaman nilai moral siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian Mukhamad Murdiono (2012) dosen Jurusan PKn dan Hukum, FISE UNY dengan judul “Penanaman Nilai Moral Kedisiplinan Pada Siswa Smp Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai moral kedisiplinan yang dilakukan oleh guru PKn menggunakan pendekatan demokratis. Cara ini dilakukan oleh guru melalui penerapan kedisiplinan yang lebih mengedepankan aspek edukatif daripada hukuman yang diberikan kepada siswa. Guru dalam membuat aturan dilakukan dengan cara menggunakan penjelasan dan rasional yang jelas mengapa siswa harus menerapkan kedisiplinan di sekolah. Selain memberikan hukuman guru juga memberikan penghargaan (reward). Selain itu pula Teuku Ramli Zakaria (2013) melalui penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Nilai Dan Moral Melalui Pembelajaran Kooperatif Pada Anak SMP”. Hasilnya adalah pengembangan nilai dan moral anak adalah adanya keterampilan afektif anak itu sendiri, yaitu keterampilan utama untuk merespon orang lain dan pengalaman-pengalaman barunya, serta memunculkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan teman disekitarnya.